

Kuliah Umum Pusat ASEAN UMA Dengan Tema Tantangan Politik Dan Keamanan Di Kawasan ASEAN

Pusat Asean Universitas Medan Area (UMA) mengadakan kuliah umum dengan tema "Tantangan Politik dan Keamanan di Kawasan ASEAN" pada Jum'at 25 Oktober 2019 di Convention Hall Gedung Perpustakaan kampus I UMA.

Adapun yang hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Medan Area Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Sc, Para Wakil Rektor, Dekat Hukum UMA Dr. Rizkan Zulyadi, SH, M.H, Dosen dan Mahasiswa lingkungan Universitas Medan Area, adapun narasumber yang hadir Deputy Menko Polhukam Urusan Luar Negeri Dr. (HC) Lutfi Rauf MA dan mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang hadir salah satunya IAIN dan UIN.



Adapun sambutan rektor serta membuka acara kuliah umum mengatakan kini tantangan keamanan kawasan begitu luar biasa untuk kalangan milenial, kita harus miliki literasi media sosial dan jangan gegabah menyebarkan informasi yang ada di medsos," katanya.

Ketua Pusat Studi ASEAN Dr Faisal Amri Tanjung SST MT menuturkan, lembaga yang dipimpinnya dibentuk untuk mendorong pemahaman dan partisipasi para akademisi dan mahasiswa terhadap ASEAN.

Pusat Studi ASEAN UMA, katanya, telah melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai sebuah lembaga pengkajian ilmiah pelaksanaan berbagai program kerjasama atau joint committee, seperti dalam Seminar Internasional ICoPOID 2019 (International Conference of Politics of Development) kerjasama antara UMA, USU dan USM Malaysia.



Ke depan Pusat Studi ASEAN UMA akan melaksanakan sejumlah program riset dan pengabdian yang ditujukan untuk lebih mengeksplorasi dan mengkaji potensi sumber daya lokal, seperti pengkajian potensi Selat Malaka secara geografis dan geopolitik dalam kawasan keamanan politik ASEAN," kata Dekan Fakultas Teknik.

Selanjutnya Deputy Menko Polhukam Urusan Luar Negeri Dr. (HC) Lutfi Rauf MA mengatakan nstabilitas politik di berbagai wilayah masih berlangsung, termasuk terjadinya proxy war, kini tak perlu pakai misil untuk melancarkan perang, tapi melalui gadget. Itulah pentingnya ketahanan nasional bagi masyarakat majemuk seperti Indonesia," paparnya.